

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pemberitaan beberapa media di Indonesia memuat pesan satire untuk memberikan kritik pada suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Keraf (2016, pp. 143–144), satire merupakan salah satu golongan gaya bahasa sindiran. Pesan yang dimuat didalamnya mengandung kritik terhadap suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat maupun terhadap suatu individu. Namun, makna yang dihasilkan dapat berbeda apabila pembaca tidak memahami secara seksama terkait apa yang disampaikan. Karena makna yang sebenarnya dimaksud berbeda dengan uraian yang disampaikan.

Pesan satire salah satunya dapat dimuat dalam bentuk kartun editorial. Penggunaan kartun editorial banyak ditemukan pada halaman media. Seperti dalam media cetak, media *online*, hingga televisi. Karena memuat pendapat subjektif, teks editorial dalam bentuk kartun biasa dimuat dalam kolom opini berkaitan dengan isu yang terjadi. (Saptoyo, 2020a)

Gambar I.1 menunjukkan keberagaman penggunaan kartun editorial yang ada dalam beberapa media di Indonesia. Secara berurutan, terdapat beberapa contoh unggahan dari ayosemarang.com, tvOne, surat kabar Kompas, majalah Tempo, jawapos.com, dan poliklitik.com. Peristiwa yang sedang terjadi digambarkan dalam gambar-gambar ilustrasi disertai tulisan singkat sehingga secara otomatis menarik perhatian pembaca yang melihatnya.

Gambar I.1 Kompilasi Kartun Editorial dari Berbagai Media



Sumber: (Kartun Editorial - Google Penelusuran, n.d.)

Visual kartun ternyata tidak sekedar untuk menarik perhatian atau menghibur, namun memiliki pesan kritik dibaliknya. Menurut Sudarta (1987 dalam Yudiarti, 2012, p. 3), kartun meliputi karikatur dan gambar humor yang menggambarkan suatu figur dengan memuat pesan satire. Bahkan lebih lanjut menurut Jacob Oetama, Pemimpin Umum Kompas, kartun bukan sebagai bentuk pemberontakan, namun mewujudkan misi perbaikan yang ditujukan pada seorang figur melalui pesan-pesan kritik. (Affan, 2012)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wirawan & Tanjung (2013), menjelaskan bahwa kartun dapat mengkritik suatu peristiwa, dalam hal ini adalah dampak sosial dari bencana alam meletusnya Gunung Merapi. Kritik yang disampaikan mencakup tiga hal, yaitu masyarakat harus mengimbangi kekuatan alam dengan kegiatan yang diusahakan agar mengerti langkah apa yang harus diambil. Kedua, pemerintah diharapkan memberikan solusi atas korban yang terdampak, seperti dengan misi pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga, tanggung

jawab pemerintah dalam bencana alam yang terjadi harus didukung oleh bantuan sosial mandiri.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Yudiarti (2012), mendukung bahwa kartun karikatur dapat menjadi media komunikasi sosial yang menghibur, namun memiliki makna dibaliknya. Peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dituangkan dalam visual kartun yang memuat humor sehingga dapat menghibur sekaligus mengedukasi.

Hal itu membuktikan bahwa kartun dapat dijadikan media dalam menyampaikan pesan kritik. Visual yang mengandung humor akan mengundang atensi pembaca, yang kemudian diharapkan dapat dipahami dan memberikan teguran sekaligus penyadaran bagi pihak yang bersangkutan.

Maraknya kartun yang memuat kritik dilatarbelakangi oleh media-media besar yang mendominasi akses informasi masyarakat Indonesia karena kepemilikan media oleh beberapa tokoh yang memiliki kepentingan politik. Praktik ini kemudian disebut dengan konglomerasi media, yang menunjukkan bahwa kepemilikan media terpusat dalam suatu arus yang sama. Terpaan berita begitu banyak didapatkan hingga pembaca merasa memiliki kekayaan informasi. Namun dalam praktiknya, berita hanya diatur sedemikian rupa dengan muatan ekonomi dan politik. Hal itu menyebabkan hilangnya alternatif informasi bagi pembaca. (Syahputra, 2019, p. 33)

Djamal & Fachruddin (2017, p. 84), menuliskan bahwa konglomerasi media termasuk dalam tiga tahap perkembangan industri media massa yang

signifikan setelah era Reformasi 1998. Hal itu memperkuat argumen bahwa semakin zaman berkembang, semakin sempit kepemilikan media di Indonesia.

Sempitnya kepemilikan media bukan hanya berkaitan dengan isu ekonomi, namun juga menyangkut isu demokrasi. Sumber informasi dari berbagai pihak dibutuhkan agar masyarakat dapat menerima berbagai sudut pandang sehingga dapat memutuskan pendiriannya. Dengan konglomerasi, ketersediaan beragam sudut pandang informasi menjadi terbatas. (Baran, 2019, p. 92)

Kehadiran media massa diharapkan dapat menjadi wadah dalam penyampaian suara-suara masyarakat. Namun praktik konglomerasi – seperti digambarkan dalam tabel I.1 bahwa sekian banyak media hanya dimiliki segelintir orang – menghambat cita-cita tersebut. Media kemudian semakin menjauh dari kepentingan publik dan beralih pada kepentingan ekonomi dan politik.

Tabel I.1
Peta Konglomerasi Indonesia

PEMILIK	GRUP	MEDIA
Chairul Tanjung	CT Corp	TransVision, TransTV, Trans7, CNN, PT. Indonusa Telemedia, detikcom
Hary Tanoesoedibjo	Global MediaCom (MNC)	Satelit Indostar II, Mnc, GlobalTV, Koran Sindo, RCTI, okezone.com, sindonews.com, Global Radio, Vision, RDI, MNC 104,6 FM Trijaya
Eddy Sariaatmadja	Emtek	Bitnet Komunikasindo, SCTV, Indosiar, Liputan6.com, nexmedia, elshinta, oChannel
James Riady	Lippo	LinkNet, Berita Satu, Suara Pembaruan, First Media
Jacob Oetama	Kompas Gramedia	K-Vision, Kompas, KompasTV, Sonora, Tribunnews.com
Aburizal Bakrie	Bakrie Group	Bakrie Telecom, tvOne, antv, viva
Dahlan Iskan	Jawa Pos Group	FIC, Fajar FM, jpnn.com, jawapostv
Surya Paloh	Media Group	Media Group, MetroTV, Media Indonesia, metrotvnews.com

Sumber: (Tapsell, 2017, p. 28)

Demi terciptanya masyarakat demokratis, media seharusnya berperan dalam menyediakan *information-rich society* untuk mencapai *ideal of society*. Komunikasi yang interaktif dibutuhkan antara organisasi media dan publik untuk mencapai pemahaman yang sama serta menunjukkan *social progress*. (Syahputra, 2019, p. 33)

Kepentingan ekonomi dan politik oleh tokoh pemilik media-media besar atau media arus utama tidak dapat dihindarkan. Pekerja media didorong untuk

membuat pemberitaan yang cenderung mencari keuntungan, serta melindungi kepentingan pemilik. Hal itu menyebabkan semakin terhimpitnya suara-suara publik, sehingga muncul suatu media alternatif yang dapat menjadi solusi dari permasalahan diatas.

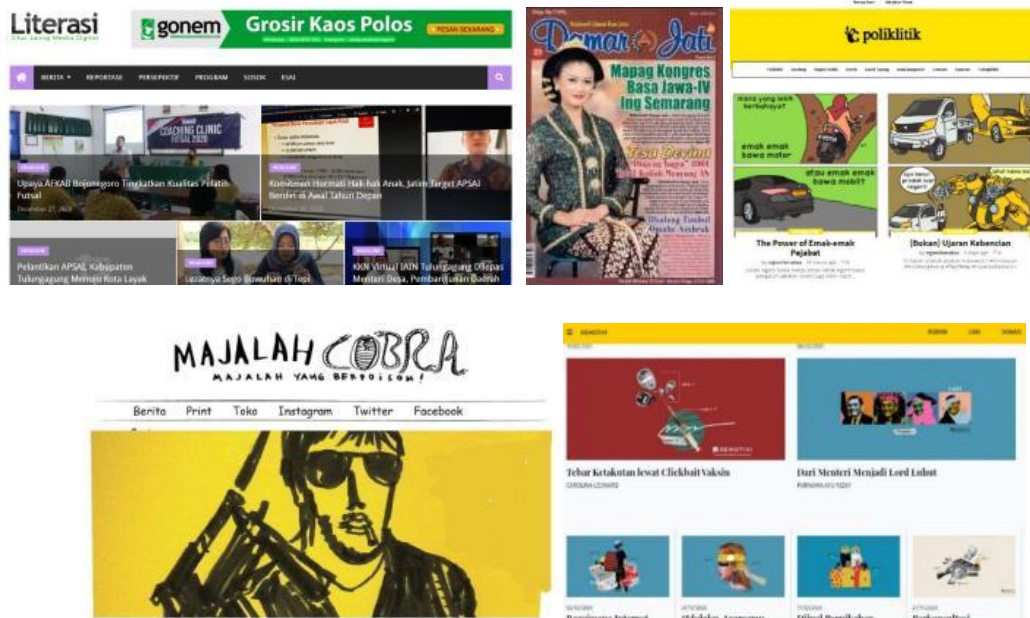
Kehadiran media alternatif berperan untuk melawan media arus utama. Penyuguhan berita berisi sudut pandang lain dari apa yang disampaikan media sebelumnya. Hal itu bukan selalu berarti kritik, melainkan menghadirkan interpretasi lain disertai nilai-nilai alternatif saat media arus utama tidak menyampaikan berita yang bertentangan dengan nilai-nilai organisasi medianya. (Atton, 2002, p. 10)

Seperti disimpulkan oleh Fiske (1992 dalam Atton, 2002, p. 11), inti perbedaan media alternatif dan media arus utama adalah pada pemilihan berita dan cara pemilihannya. Sebagai kontra dari media arus utama, media alternatif tidak berorientasi pada keuntungan serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Karena itu, media alternatif melakukan pendekatan secara konsisten terhadap berita yang diproduksi.

Sama seperti media-media pada umumnya, media alternatif juga memungkinkan hadir dalam berbagai bentuk. Bahkan lebih jauh dari itu. Media alternatif dapat mencakup bentuk majalah, pers puisi, hingga penerbit cerita fiksi. (Atton, 2002, p. 10)

Terdapat beberapa media alternatif yang tumbuh di Indonesia. Diantaranya adalah literasi.co.id, majalah Damar Jati, poliklitik.com, majalahcobra.com, dan remotivi.or.id.

Gambar I.2
Kompilasi Media Alternatif



Sumber: (Media Alternatif Di Indonesia - Penelusuran Google, n.d.)

Dari fenomena yang ada, terdapat suatu media alternatif yang menjadikan kartun editorial bukan hanya sebagai salah satu rubrik, melainkan sebagai konten utamanya, yaitu Poliklitik.

Poliklitik merupakan media *online* yang berperan melawan media arus utama dengan konten utama berupa kartun editorial. Awal didirikan oleh Brodo Bilowo pada tahun 2015 dengan dibantu oleh Geomedia Group untuk masalah pendanaan dan *domain*. Konten dalam unggahan Poliklitik berisi ilustrasi, kartun, dan karikatur disertai *caption* singkat yang mendukung gambar. Tujuannya mengajak anak muda berumur 18-24 tahun untuk bersikap kritis pada kebijakan-kebijakan pemerintah. (Afandi & Abdullah, 2018, p. 173)

Dalam *website* poliklitik.com terdapat beberapa menu seperti Wajah Politik, Komik, Anak Bangsa(T), Cotcast, hingga Polingklitik. Sebagai media alternatif, Poliklitik memuat pemberitaan dari sudut pandang yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh media arus utama. Setiap unggahan disertai pesan satire dalam bentuk kartun editorial disertai dengan uraian yang berkaitan dengan pemberitaan yang disampaikan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afandi & Abdullah (2018), menemukan bahwa Poliklitik memenuhi praktik jurnalisme alternatif yang efektif, yaitu tidak bertolak pada keuntungan, bertanggung jawab sosial, dan pendirinya secara sadar mengakui bahwa medianya merupakan tandingan dari media arus utama.

Tidak berhenti pada media *online*, Poliklitik melihat kemudahan kemajuan teknologi yang dapat membantu menjangkau pembaca yang lebih luas, yaitu melalui media sosial. Unggahan pada media *online* diikuti dengan uraian yang lebih *detail* terkait dengan pemberitaan yang disampaikan. Namun pada media sosial, *caption* dibuat lebih singkat lengkap dengan *hashtag* dengan tujuan mempopulerkan unggahannya. Media sosial dipercaya dapat menjangkau pembaca yang luas karena Majid (2020, p. 230) menjelaskan bahwa *gadget* sangat memudahkan seseorang untuk mengakses media sosial. Dengan harga yang terjangkau untuk internet serta spesifikasi *gadget* yang baik, pengguna dapat mengakses media sosial dengan mudah dan cepat, sehingga mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi.

Karena itu, Poliklitik membuat media sosial Instagram di samping media *onlinenya* dengan nama @poliklitik. Romli (2020, pp. 107–108) menjelaskan bahwa media sosial memiliki kemampuan untuk membagikan berbagai bentuk konten dengan mudah dan cepat, yang kemudian memungkinkan pengguna untuk terhubung satu sama lain dengan memberikan respon terhadap unggahan terkait. Karakteristik tersebut rupanya tergambar dalam Instagram @poliklitik. Dari unggahan yang dibagikan, pembaca Poliklitik aktif memberikan umpan balik dalam bentuk *like* dan *comment* yang beragam sehingga semakin mendukung Poliklitik untuk menjadi media yang membuat pembacanya bersikap kritis dan skeptis dalam menerima kebijakan yang dikemas dalam humor.

Media sosial kini menjadi ruang pemberitaan karena dianggap kuat, baik dari sisi pembuat pesan, maupun penerima pesan. Pembuat pesan tidak harus memiliki profesi sebagai jurnalis profesional. Bahkan kelompok non-jurnalis dapat ikut serta mendistribusikan pesan. Pembaca juga semakin terfasilitasi dalam hal penyampaian pendapat dan partisipasi dalam lingkungan kebijakan politik. (Jones & Salter, 2012, p. 172)

Mayoritas kartun editorial ditempatkan pada halaman khusus opini dalam media arus utama. Namun dalam media alternatif seperti Poliklitik, kartun editorial dapat berdiri sendiri menjadi konten utama. Bahkan konten kartun editorial yang ditempatkan pada media sosial dapat mengundang atensi pembaca untuk memperhatikan. Seiring dengan kepopuleran media sosial, karikatur atau kartun dikenal dengan sebutan *meme*. Jika menganggap *meme* merupakan hal baru, adalah suatu kesalahan. Karena *meme* hanya sebutan baru untuk karikatur. Kedua

hal tersebut berarti sama, yaitu visual yang mengandung unsur humor, kritik, atau sindiran. (Romli, 2020, p. 178)

Poliklitik secara aktif mengunggah isu-isu yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat dalam akun Instagram @poliklitik. Isu yang ada dikemas dalam bentuk kartun editorial disertai pesan singkat dalam gambar dan *caption* yang menyajikan sudut pandang lain dari yang disampaikan media arus utama. Setiap unggahan mengemas kritik dan sindiran pada suatu fenomena. Gambar I.3 menunjukkan deretan gambar yang diunggah @poliklitik.

Gambar I.3
Beberapa Unggahan Instagram @poliklitik



Sumber: (Poliklitik (@poliklitik) • Instagram Photos and Videos, n.d.)

Masing-masing unggahan tersebut mendapat respon yang beragam dari para pengikut. Namun usaha menjadi media alternatif yang memiliki cita-cita untuk membantu masyarakat berpikir kritis rupanya mendapati suatu kendala. Mengutip dari wawancara dan observasi peneliti dengan Poliklitik, pihaknya menyatakan bahwa ada beberapa yang *baper* terhadap unggahan kritik dari Poliklitik sehingga banyak di *report* oleh beberapa pihak.

Fasilitas *report* yang berada di Instagram memiliki dua jenis, yaitu pelaporan pada unggahan, pesan, atau komentar tertentu dan pelaporan akun. Dalam pelaporan akun juga terdapat tiga alasan mengapa ingin melakukan *report* terhadap akun tertentu, diantaranya karena konten unggahan yang tidak seharusnya berada di Instagram, akun yang ada berpura-pura menjadi orang lain, atau pemilik akun memiliki kemungkinan berada di usia kurang dari 13 tahun.

Berdasarkan analisis masalah yang dialami Instagram @poliklitik, pihaknya mendapatkan report akun tentang konten unggahan yang tidak seharusnya sehingga menyebabkan akun Instagram @poliklitik harus di *take down* oleh Instagram. Diasumsikan ada pihak dan / atau pendukung pihak terkait yang tersinggung dengan unggahan @poliklitik sehingga beramai-ramai melakukan aksi pelaporan.

Pihak Poliklitik telah memproses pengajuan akun kembali kepada pihak Instagram dan masih menunggu kepastian untuk dapat dipulihkan kembali atau tidak. Tidak tinggal diam, mulai tanggal 10 Agustus 2021, Poliklitik membuat Instagram baru sebagai *back up* ganti tempat unggahan karya kontennya selama akun lama belum kembali dengan nama @poliklitikid, dengan prinsip tetap konsisten untuk menjadi media alternatif yang menyampaikan sudut pandang lain secara aktif. Hingga pada 25 Agustus 2021, akun @poliklitik berhasil dipulihkan dan kembali mengunggah konten pemberitaan. Keberhasilan kembalinya akun @poliklitik menandakan bahwa Poliklitik berhasil melakukan verifikasi pada pihak Instagram yang membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terbukti dilakukan.

Dari beberapa unggahan yang ada, peneliti melihat isu menarik yang sedang beredar di tengah masyarakat Indonesia. Sejak penemuan kasus pertama pada Maret 2020, Covid-19 terus bermutasi hingga menghasilkan beberapa varian baru. Mengutip dari (Sibuea, 2021, pp. 1–2), kecepatan penyebaran varian baru tersebut yang diperkirakan menyebabkan kasus Covid-19 kembali meningkat.

Terdapat beberapa unggahan yang dibahas Poliklitik terkait kebijakan pemerintah yaitu tentang wajib melakukan vaksin, bangga berwisata, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Unggahan terkait vaksin membahas mulai tentang terdapat beberapa kelompok masyarakat yang terbawa konspirasi sehingga menolak vaksin, hingga kemudian vaksin dijadikan syarat wajib dalam melakukan aktivitas dan perjalanan sehingga berbalik keadaan menjadi ramai-ramai mencari vaksin. Selain itu, unggahan terkait kebijakan ajakan berwisata juga berisi kritik bagaimana dengan masyarakat yang masih kesulitan ekonomi di tengah pandemi.

Namun dibanding kedua kebijakan diatas, peneliti melihat kebijakan yang menarik saat Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menerapkan PPKM meliputi pembatasan kegiatan industri, kegiatan belajar mengajar, kegiatan perdagangan, transportasi umum, tempat ibadah, hingga fasilitas umum. Semua hal tersebut bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat serta menurunkan jumlah kasus positif Covid-19. PPKM memiliki dampak yang cukup meluas serta terjadi secara berkelanjutan. Masyarakat pun mau tidak mau akan terdampak, dan tidak bisa memilih untuk menghindar.

Penerapan pembatasan kegiatan ini rupanya merepotkan beberapa masyarakat, salah satunya dalam kegiatan bekerja. Beberapa masyarakat tidak bisa hanya diam di rumah seperti para petinggi. Saat ruang gerak dibatasi, beberapa masyarakat tetap berusaha untuk mencari jalan demi mendapatkan nafkah. Lebih dari itu, banyak dari mereka yang bekerja dari sektor informal. Sehingga apabila banyak aktivitas yang dibatasi, sumber penghasilan mereka menjadi terhambat, atau bahkan tidak ada. (Azanella, 2021)

Unggahan Instagram @poliklitik memuat kritik terkait kebijakan PPKM yang dilakukan pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat di masa pandemi Covid-19. Didalamnya memuat gambar kartun disertai *caption* yang menarik, ditambah menuai banyak komentar yang beragam dari pembaca.

Gambar I.4
Unggahan @poliklitik Terkait Kebijakan PPKM dalam Pandemi Covid-19



Sumber: (Poliklitik (@poliklitik) • Instagram Photos and Videos, n.d.)

Unggahan pertama dari kiri disertai caption sebagai berikut:

`Standar Dua PPKM – Antara PPKM dan PPKn.. hhe`

Kemudian diikuti unggahan kedua:

`The PPKM: The Virus Made Me Do It – Pepatah ORANG BAIK pun mengatakan: Yo Ndak Tau, Koq Tanya Saya?! Heuheuheu..`

Dan unggahan yang ketiga:

`Aparat Tampar Rakyat - Alasan klasik paling bisa: "cApEk. B@nyak yan9 nGgAk nUrUd". Cih. Tidur aja nonton sinetron di rumah, kalo nggak mau capek!`

Ketiga unggahan tersebut mendapatkan ribuan *likes* dan puluhan hingga ratusan komentar. Keberagaman komentar yang diunggah pengikut Instagram @poliklitik menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan serta nilai yang dianut oleh masing-masing individu:

Komentar dari ram***m:

`Klo anda"ini mengkritik pemerintah , berarti anda radikal."`

Komentar dari cua***y:

`Syia siap ikut ppkm. Agar pemerintah berhasil membumihanguskan korona.`

Komentar dari waw***a:

`PPKM Pelan Pelan Kita Mati.`

Komentar dari alo***a:

`Karna aturan hanya untuk rakyat Indonesia.`

Komentar dari be***h:

`Tetap percaya pada kekuasaan Tuhan semesta alam, kekuasaan manusia hanya sementara. Yang sabar kawan2 jangan putus asa meski hidup ini rumit`

Gambar dan *caption* dalam unggahan tersebut menunjukkan adanya sindiran terhadap apa yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Tertulis pesan tersirat yang berarti bahwa pengelolaan kebijakan yang ditetapkan pemerintah rupanya tidak tepat dan merugikan suatu kelompok masyarakat.

Media arus utama memberitakan bahwa pemerintah mengusahakan kebijakan terbaik untuk kepentingan seluruh rakyat. Segala upaya dilakukan untuk menekan angka kasus penyebaran sekaligus menjaga kesejahteraan rakyat. Namun,

Poliklitik sebagai media alternatif memberikan sudut pandang lain yang tidak tersampaikan.

Keberagaman komentar yang ada pada unggahan Instagram @poliklitik dapat didukung dengan teori *Post-Truth* dalam penelitian yang dilakukan oleh (Bufacchi, 2020, p. 348), bahwa khalayak melihat berita bukan untuk mencari kebenaran, namun sebagai bentuk konfirmasi atas apa yang sudah diyakini. Karena kebenaran sudah digantikan dengan realitas baru. Dalam *Oxford English Dictionary (OED)* diartikan sebagai suatu kata sifat yang lebih menarik keyakinan dan emosi pribadi seseorang dibanding penyuguhan fakta-fakta objektif.

Kecanggihan yang dimiliki oleh media sosial – dalam hal ini adalah Instagram – juga memberikan kemudahan pada akses dan penyebaran informasi. Konten yang diunggah pada suatu akun tidak hanya dapat dibaca oleh pengikut akun tersebut saja, melainkan dapat dilihat oleh seluruh pengguna hingga bahkan dibagikan pada *platform* lainnya. Dengan begitu, konten pemberitaan yang ada dapat tersebar luas pada masyarakat.

Peneliti kemudian merangkum bahwa sebagai media alternatif, Poliklitik ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah mengalami ketidaktepatan pengelolaan kebijakan sehingga merugikan suatu kelompok masyarakat. Karena dibalik kebijakan yang ditetapkan, terdapat oknum yang masih mendapatkan kelonggaran atau bahkan keuntungan.

Praktik hadirnya Poliklitik sebagai bentuk jurnalisme alternatif sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya, yaitu Afandi & Abdullah (2018). Dalam hal ini,

peneliti kemudian tertarik untuk meneliti dari sisi pembaca. Bagaimana pembaca Instagram @poliklitik memaknai pesan satire dalam konten kartun editorial terkait pandemi Covid-19 sebagai media alternatif. Hal ini dilakukan karena pesan dalam media sosial memungkinkan penggunaannya memaknai pesan berdasarkan asumsi dan persepsi yang dimilikinya. Sehingga penerimaan bisa jadi berbeda dengan apa yang sebenarnya dimaksud oleh pengirim pesan. (Suwatno, 2018, p. 53)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dwiputra (2021) dengan tema penerimaan berita Covid-19 dalam media *online* KlikDokter.com yang berfokus pada tema kesehatan. Bagaimana penonton memaknai pemberitaan yang disampaikan oleh *website* yang khusus menyajikan pemberitaan tentang kesehatan. Di masa pandemi khususnya, pemberitaan seputar tenaga kesehatan, kebijakan pemerintah, juga jumlah korban dan kasus positif Covid-19 akan banyak dibaca dan menghasilkan beragam respon dari pembaca.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyono et al. (2020) menjelaskan tentang penerimaan penonton pada berita hoax tentang kampanye Pemilihan Presiden 2019 di era *Post-Truth*. Penerimaan penonton rupanya banyak dipengaruhi oleh perasaan dibanding logika. Hal itu yang menyebabkan penonton memiliki makna yang berbeda dalam menafsirkan pesan.

Penelitian tentang penerimaan penonton pada media sosial pernah dilakukan oleh Oktayusita et al. (2019). Masing-masing informan akan disuguhkan produk media sesuai kebutuhan peneliti, dalam hal ini adalah iklan politik. Perbedaan pemaknaan pada penonton biasa dipengaruhi oleh perbedaan latar

belakang, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, atau yang lainnya hingga kemudian menghasilkan tiga posisi khalayak menurut Stuart Hall.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Hariyanto (2016) bercerita tentang penerimaan pejabat publik pada suatu acara televisi yang memberi informasi tentang kebijakan baru di kalangan masyarakat. Hasil menunjukkan program ini mendapat resepsi positif atau dominan hegemoni karena dapat memberi masukan pada pemerintah, narasumber yang efektif, dan adanya fasilitas mediasi pemerintah dengan masyarakat.

Zenor (2012) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa media – dalam hal ini adalah New Yorker – mulai kehilangan kendali pesan dan tidak dapat mempengaruhi pendapat publik. Hal itu disebabkan karena pemaknaan masyarakat akan terjadi berdasarkan nilai individu yang dianut sebelumnya. Sehingga pemaknaan dapat berbeda dengan apa yang sebenarnya disampaikan.

Penelitian kali ini akan mencari tahu bagaimana penerimaan penonton pada media alternatif dalam bentuk media sosial Instagram dengan konten utama kartun editorial. Penelitian ini menarik karena terdiri dari beberapa hal yang saling berkaitan. Bagaimana media alternatif hadir sebagai tandingan arus utama, dengan menggunakan media sosial untuk mengundang lebih banyak pembaca, serta dapat memfasilitasi ruang diskusi dan partisipasi dalam menyampaikan pendapat. Kartun editorial juga menjadi alat untuk menyampaikan pesan kritik dan sarkas dengan sisipan humor. Serta bagaimana era *Post-Truth* terjadi, dimana pembaca akan lebih dipengaruhi oleh perasaan dibanding logika. Penelitian ini diprediksi dapat

menghasilkan tiga posisi khalayak menurut Stuart Hall karena melihat keragaman komentar dari beberapa unggahan yang dimaksud.

Karena pemaknaan pesan yang berbeda oleh masing-masing pembaca, peneliti menemukan metode yang paling cocok digunakan adalah *reception analysis*. Teori *encoding* dan *decoding* yang berfokus pada produksi makna dan pengalaman khalayak dapat membantu peneliti untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Perbedaan penerimaan makna dapat terjadi karena faktor latar belakang, hubungan, serta infrastruktur teknis. (Hall et al., 2005, pp. 119–120)

Pencarian data informan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat informan secara dalam dengan mengenal informan secara pribadi. Sedangkan observasi ditujukan untuk mengamati tingkah laku informan. (Neuman, 2014, p. 51)

Akhir penelitian ini akan menghasilkan tiga posisi khalayak oleh Stuart Hall dalam memaknai pesan, yaitu *dominant-hegemonic position*, *negotiated position*, dan *oppositional position*. (Alasuutari, 1999, p. 4)

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menemukan rumusan masalah yang berbunyi “Bagaimana penerimaan pembaca akun Instagram @poliklitik terhadap pesan satire dalam konten kartun editorial terkait pandemi Covid-19?”

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan pembaca akun Instagram @poliklitik terhadap pesan satire dalam konten kartun editorial terkait pandemi Covid-19.

I.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan-batasan agar tidak menyimpang dari fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, batasan-batasan penelitian terdiri dari:

1. Objek penelitian merupakan penerimaan pembaca akun instagram @poliklitik terhadap pesan satire dalam konten kartun editorial terkait pandemi Covid-19.
2. Subjek penelitian merupakan pembaca akun Instagram @poliklitik dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal di Jawa dan / atau Bali, serta konten kartun editorial dalam Instagram @poliklitik terkait pandemi Covid-19.
3. Metode penelitian menggunakan metode analisis resepsi dengan tiga posisi *decoding* audiens menurut Stuart Hall.

I.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga manfaat, yaitu akademis, praktis, dan sosial.

Berikut manfaat penelitian:

a) Manfaat Akademis

Penelitian ini akan menambah jurnal penelitian dalam bidang komunikasi, dengan metode analisis resepsi. Dalam hal ini adalah penerimaan penonton terhadap konten pemberitaan kartun editorial di dalam salah satu teks komunikasi, yaitu unggahan instagram. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan bahasan / tema yang serupa.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini akan menghasilkan bagaimana penerimaan pembaca akun Instagram @poliklitik terhadap konten kartun editorial terkait pandemi Covid-19. Sehingga dapat memberikan gambaran dan pengetahuan tentang penerimaan khalayak tentang pemberitaan Covid-19 dalam bentuk kartun editorial. Serta dapat menjadi informasi terkait audiens bagi pemilik akun Instagram @poliklitik.

c) Manfaat Sosial

Penelitian ini akan memberikan gambaran pada media-media alternatif, khususnya Poliklitik, bagaimana pembaca memaknai pesan yang dikirimkan media. Juga bagaimana penerimaan pembaca pada penggunaan pesan satire sebagai bentuk kritik pada suatu fenomena dalam bentuk kartun editorial di media sosial.